

OPTIMALISASI PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI DESA DALAM PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT OLEH PEMERINTAH DESA CIMANGGU KECAMATAN LANGKAPLANCAR KABUPATEN PANGANDARAN

Oki Ardiansyah¹, Endah Vestikowati², Asep Nurdin Rosihan Anwar³

Universitas Galuh Ciamis

Email: oky.ardiansyahz47@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dari hasil observasi yang menemukan beberapa permasalahan dalam Optimalisasi Penggunaan Sistem Informasi Desa Dalam Pelayanan Kepada Masyarakat Oleh Pemerintah Desa Cimanggu Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran, hal ini di karenakan belum meratanya jaringan internet, belum adanya operator khusus, dan belum terkelolanya website. Adapun tujuan penelitian ini merupakan untuk mengetahui Optimalisasi Penggunaan Sistem Informasi Desa Dalam Pelayanan Kepada Masyarakat Oleh Pemerintah Desa Cimanggu Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi pustaka dan studi lapangan berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik pengolahan data yaitu dengan cara reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Optimalisasi Penggunaan Sistem Informasi Desa Dalam Pelayanan Kepada Masyarakat Oleh Pemerintah Desa Cimanggu Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran belum sepenuhnya dilakukan secara optimal, sebagaimana pendapat Hotniar Siringoringo (2005:5) yaitu tujuan, alternatif keputusan, dan sumber daya yang membatasi, dibuktikan masih banyak masyarakat yang belum paham tentang sistem informasi desa, masyarakat tidak semua memiliki smart phone, edukasi yang diberikan masih kurang, kurangnya anggaran dan sarana dan prasaranan masih belum begitu kumulit.

Kata kunci : *Optimalisasi, Sitem Informasi Desa, Pemerintah Desa.*

PENDAHULUAN

Teknologi informasi dan komunikasi saat ini mulai berkembang kearah optimalisasi konten setelah hampir seluruh wilayah di Indonesia mulai mendapat fasilitas pengembangan infrastruktur jaringan. Beberapa daerah terpencil yang awalnya sangat sulit berkomunikasi dengan wilayah lain saat

ini dapat dijangkau dengan media komunikasi seluler setelah oprator telekomunikasi membangun BTS (*Base Transceiver Station*) di daerah-daerah tersebut. Ketersediaan fasilitas inilah yang seharusnya dapat dimanfaatkan sepenuhnya agar tidak hanya sekedar tidak hanya menjadi media komunikasi saja, tetapi dapat digunakan juga

sebagai alat untuk memberikan layanan kepada masyarakat.

Pengembangan konten teknologi informasi saat ini berkembang pesat seiring dengan banyaknya ide dan potensi yang dapat dikembangkan di daerah-daerah yang sebelumnya belum tersentuh teknologi. Contoh paling sederhana adalah pengembangan *website* untuk media penyampaian informasi kepada masyarakat, profil desa yang menyajikan informasi terkini keadaan desa dan layanan-layanan lain.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional; bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik; bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik; bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, mengamanatkan pada aspek pengelolaan desa yang

diharapkan dapat mendorong kemajuan desa dengan mengoptimalkan potensi desa tersebut. Salah satu kewajiban yang dilaksanakan desa sesuai dengan undang-undang desa adalah keterbukaan informasi publik adalah merancang, melaksanakan, dan melaporkan penggunaan anggaran dan pengelolaan sumber daya desa. Sebagaimana dalam pasal 86 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa mengamanatkan bahwa, sistem informasi desa berisi informasi yang meliputi data desa, pembangunan desa, Kawasan perdesaan serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa dan pembangunan kawasan desa.

Desa Cimanggu merupakan salah satu desa di Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran. Desa Cimanggu memiliki penduduk sebanyak 3.609 orang 1.799 laki-laki dan 1.810 perempuan jumlah kepala keluarga 1.355 KK kepadatan penduduk 29,00 perKM terdiri dari 8 Rukun Warga dan 25 Rukun Tetangga. Jarak ke Ibu Kota Kecamatan 8 km dan ke Ibu Kota Kabupaten 35 km.

Sebelum adanya sistem informasi desa surat-surat yang dikeluarkan oleh pemerintah desa menggunakan sistem manual. Meski telah menggunakan komputer namun pembuatan surat diketik secara konvensional kemudian penomoran dilakukan menggunakan buku besar dan tidak memiliki arsip. Seluruh layanan menggunakan cara yang sama sesuatu standar layanan yang sudah dibuat oleh Sekertaris Desa.

Sistem Informasi adalah sistem yang menyajikan informasi elektronik yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 86.

Namun berdasarkan hasil observasi, diketahui bahwa sistem informasi desa di Desa Cimanggu belum optimal. Hal ini dibuktikan dengan adanya indikator-indikator masalah sebagai berikut:

1. Masih belum meratanya jaringan internet. Hal ini dapat dilihat dari empat dusun yang ada di Desa Cimanggu, hanya dua dusun yaitu: Dusun Cimanggu dan Dusun Cintajaya yang jaringannya stabil. Hal itu dikarenakan dusun tersebut dekat dengan Kantor Desa. Sedangkan Dusun Ciceuri dan Dusun Cibeureum dikarenakan jauh dari Kantor Desa jaringan yang ada belum stabil.
2. Belum adanya operator khusus pemegang akun dan *website* desa. Hal ini terlihat dari pengelolaan akun dan *website* desa yang masih kurang terkelola, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat belum optimal.
3. Belum adanya perangkat desa yang fokus untuk mengelola akun dan *website* desa. Hal ini

terlihat dengan pemegang akun dan *website* desa yang masih dipegang oleh kaur perencanaan program dan kaur umum yang dalam pelaksanaannya lebih mementingkan bidangnya.

Maka dari itu berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Optimalisasi Penggunaan Sistem Informasi Desa Dalam Pelayanan Kepada Masyarakat Oleh Pemerintah Desa Cimanggu Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran”**.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan, adapun rumusan masalahnya yaitu: Bagaimana Optimalisasi Penggunaan Sistem Informasi Desa Dalam Pelayanan Kepada Masyarakat Oleh Pemerintah Desa Cimanggu Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran?

KAJIAN PUSTAKA

Menurut Poerwadarminta (Ali 2014:348) dikemukakan bahwa: “Optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien”. Selanjutnya menurut Winardi (Ali 2014:348). Optimalisasi adalah ukuran yang menjadi salah satu faktor tercapainya tujuan, sedangkan jika dipandang dari sudut usaha, optimalisasi adalah sebuah usaha untuk meningkatkan atau memaksimalkan kegiatan sehingga dapat tercapainya

tujuan atau harapan yang diinginkan. Kemudian menurut Siringoringo (2005:4) bahwa optimalisasi yaitu:

“Optimalisasi adalah proses pencarian solusi terbaik, tidak selalu keuntungan yang paling tinggi yang bisa dicapai jika tujuan pengoptimalan adalah memaksimalkan keuntungan, atau tidak selalu biaya yang paling kecil yang bisa ditekan jika tujuan pengoptimalan adalah meminimumkan biaya”.

Berdasarkan pengertian dari pendapat ahli diatas, bahwa optimalisasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk memaksimalkan kegiatan sehingga dapat mencapai hasil dan tujuan yang diharapkan.

Dalam optimalisasi terdapat tiga unsur elemen permasalahan menurut Hotniar Siringoringo (2005:5) yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan

Tujuan bisa berbentuk maksimalisasi atau meminimalisasikan. Bentuk maksimalisasi digunakan jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan keuntungan. Bentuk minimalisasi akan dipilih jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan waktu, jarak, dan sejenisnya.

2. Alternatif Keputusan

Pengambilan keputusan dihadapkan pada beberapa pilihan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Alternatif keputusan yang tersedia tentunya alternatif yang menggunakan sumber daya terbatas.

3. Sumber Daya yang membatasi

Sumber daya merupakan pengorbanan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Menurut Sutanto dalam Djahir dan Pratita (2015:6) Sistem adalah kumpulan/grup dari subsistem/bagian/komponen apapun, baik fisik maupun non-fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu.

Menurut Meriam-Webster sistem adalah interaksi secara teratur atau kelompok item yang saling bergantung membentuk satu kesatuan yang utuh. Sistem juga didefinisikan Meriam-Webster sebagai seperangkat ajaran, gagasan atau asas yang terorganisasi biasanya dimaksudkan untuk menjelaskan pengaturan atau cara kerja dari keseluruhan yang sistematis. (Sumber: liputan6.com).

Informasi merupakan hal yang sangat penting dalam pengambilan keputusan agar tidak terjadi kesalahan. Informasi juga diartikan sebagai data yang telah diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerima informasi.

Sedangkan menurut Sutabri dalam Trimahardika dan Sutinah (2017:250), “Informasi adalah sekumpulan data yang telah diubah, diklasifikasikan dan diinterpretasikan serta digunakan untuk proses pengambilan keputusan.

Mulyano dalam Kuswara dan Kusmana (2017:18), Sistem informasi adalah suatu sistem yaitu terdiri dari kumpulan komponen sistem yaitu

software, hardware dan brainware yang memproses menjadi sebuah *output* yang berguna untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam suatu organisasi”.

Sistem Informasi Desa merupakan suatu media atau perangkat lunak yang dikelola oleh pemerintahan desa yang bertujuan untuk memberikan pelayanan publik dan informasi publik melalui jaringan internet secara cepat yang bisa diakses oleh semua masyarakat.

Menurut Solekhan (2014:71) menyatakan bahwa:

“Sistem Informasi Desa yaitu penyediaan informasi perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk desa dalam bentuk perangkat keras maupun perangkat lunak, dan jaringan, yang meliputi: data desa, data pembangunan desa, kawasan pedesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa dan pembangunan kawasan pedesaan. Dimana Sistem Informasi Desa itu dikelola oleh pemerintah desa dan dapat diakses oleh masyarakat maupun oleh semua pemangku kepentingan”.

Sistem Informasi Desa adalah pemberian informasi yang dikelola oleh pemerintah desa baik melalui perangkat lunak dan jaringan guna memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dan informasi serta dapat menjadi suatu usaha dalam pengembangan potensi wilayah pedesaan serta menerapkan prinsip keterbukaan pemerintah (*Open Government*).

METODE

Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif, deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif (Sugiyono, 2009:1).

Metode kualitatif dipilih karena cocok dengan masalah yang diangkat dengan pendekatan kualitatif dan data yang peneliti ingin dapatkan bukanlah angka-angka, melainkan kalimat deskriptif yang menjelaskan apa adanya mengenai subjek dan objek yang diteliti.

Lamanya penelitian selama 10 bulan. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan (observasi, wawancara, dan dokumentasi). Jumlah informan sebanyak 8 orang. Adapun Teknik pengolahan data yaitu dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun hasil wawancara dengan 8 (delapan) informan tersebut, tampak sebagaimana dalam deskripsi berikut:

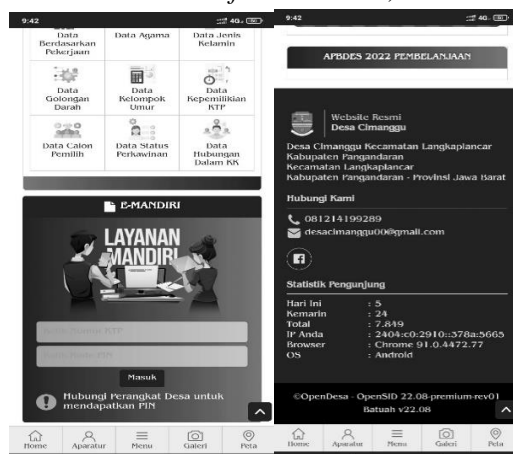
1. Tujuan

Tujuan bisa berbentuk maksimalisasi atau meminimalisasikan. Bentuk maksimalisasi digunakan jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan keuntungan. Bentuk minimalisasi akan

dipilih jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan waktu, jarak, dan sejenisnya.

Kemudian berdasarkan hasil observasi dilapangan oleh penulis dari semua indikator yang ada di dimensi tujuan bisa dikatakan sudah optimal, dimana pemanfaatan sistem informasi desa sudah dilakukan dan untuk akses layanan dan kemudahan cukup mudah bisa diakses di *handphone* dan dimana saja dibuktikan dengan gambar sebagai berikut:

Sumber : *Sistem Informasi Desa, 2022*



Berdasarkan gambar diatas diketahui bahwa sistem informasi desa sudah sepenuhnya berjalan sesuai dengan prosedurnya dan yang sering menggunakan layanan mandiri itu Bapak Rukun Warga (RW) dikarenakan Bapak RW sudah difasilitasi *handphone* oleh Provinsi untuk pogram sapa warga ketika ada masyarakatnya yang memerlukan pelayanan. Dan untuk anggarannya sendiri, anggaran yang di anggarankan oleh pemerintah desa untuk sistem informasi desa itu sebesar Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah).

Maka dari itu hasil penelitian penulis terkait optimalisasi penggunaan sistem informasi desa dalam pelayanan kepada masyarakat oleh pemerintah Desa Cimanggu Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran dari dimensi tujuan dikatakan sudah cukup optimal. Hal ini sesuai yang dikemukakan Hotniar Siringoringo (2005:4) bahwa:

Optimalisasi adalah proses pencarian solusi terbaik, tidak selalu keuntungan yang paling tinggi yang bisa dicapai jika tujuan pengoptimalan adalah memaksimalkan keuntungan, atau tidak selalu biaya yang paling kecil yang bisa ditekan jika tujuan pengoptimalan adalah meminimumkan biaya.

Berdasarkan teori tersebut bahwa optimalisasi tidak selalu keuntungan yang paling tinggi jika tujuan pengoptimalan adalah memaksimalkan keuntungan, dan tidak selalu biaya yang paling kecil yang di tekan jika tujuannya adalah meminimumkan biaya.

2. Alternatif Keputusan

Pengambilan keputusan dihadapkan pada beberapa pilihan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Alternatif keputusan yang tersedia tentunya alternatif yang menggunakan sumber daya terbatas.

Kemudian berdasarkan hasil observasi dilapangan oleh penulis dari semua indikator yang ada dalam dimensi alternatif keputusan bisa dikatakan cukup optimal, strategi pelaksanaannya ada, standar oprasional prosedur (SOP) nya ada dan pelatihan

pengelolaan sistem informasi desanya ada. Akan tetapi ada yang kiranya kurang yaitu dalam strategi pelaksanaan sistem informasi desa sosialisasi dan edukasi tidak dibarengi dengan pratek penggunaan sistem informasi desa itu, alangkah bagusnya dibarengi dengan prakteknya.

Maka dari itu hasil penelitian penulis terkait optimalisasi penggunaan sistem informasi desa dalam pelayanan kepada masyarakat oleh pemerintah Desa Cimanggu Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran dari dimensi alternatif keputusan dikatakan sudah cukup optimal. Hal ini sesuai yang dikemukakan Hotniar Siringoringo (2005:4) bahwa alternatif keputusan pengambilan keputusan dihadapkan pada beberapa pilihan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Alternatif keputusan yang tersedia tentunya alternatif yang menggunakan sumber daya yang terbatas. Berdasarkan teori tersebut bahwa alternatif keputusan merupakan aktifitas atau kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Aktifitasnya itu strategi pelaksanaan sistem informasi desa, pelatihan pengeleloan sistem informasi desa, untuk tujuannya itu untuk mempermudah masyarakat, memberikan edukasi dan pengelolaan sistem informasi desa bisa berjalan sesuai dengan pogramnya.

3. Sumber Daya Yang Membatasi

Sumber daya merupakan pengorbanan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Kemudian berdasarkan hasil observasi dilapangan oleh penulis dari semua indikator yang ada dalam dimensi sumber daya yang membatasi bisa dikatakan cukup optimal. Hal ini dibuktikan dengan walaupun operatonya *bacinya* bukan dari ITE tapi sampai sekarang sistem informasi desa bisa berjalan sesuai tidak ada hambatan yang berarti, dan untuk saran dan prasarana bisa dilihat dari gambar sebagai berikut:

Sumber : Desa Cimanggu, 2022



Berdasarkan gambar diketahui bahwa untuk pengoprasian sistem informasi desa itu, menggunakan laptop tapi mau dilaptop atau pc sama saja dan untuk *sever wifi* bisa dikatakan cukup karena walaupun dalam penggunaannya dilakukan oleh 50 orang sekaligus tidak akan ng-lag atau *buffering* ketika digunakan dan untuk ketersediaan anggarannya sendiri adalah Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah).

Maka dari itu hasil penelitian penulis terkait optimalisasi penggunaan

sistem informasi desa dalam pelayanan kepada masyarakat oleh pemerintah Desa Cimanggu Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran dari dimensi sumber daya yang membatasi dikatakan sudah cukup optimal. Hal ini sesuai dengan Nillis dan Cheema (Firdausy, 2018:25) memaparkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga organisasi ataupun Lembaga menjadi lebih optimal yaitu: adanya dukungan anggaran yang mencakup untuk biaya pelaksanaan pemerintah, tersedianya infrastruktur dan tersedianya sumber daya yang kompeten. Berdasarkan teori tersebut bahwa merupakan proses-proses atau syarat-syarat yang diperlukan agar mencapai dari kata optimal

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian diketahui bahwa Optimalisasi Penggunaan Sistem Informasi Desa Dalam Pelayanan Kepada Masyarakat Oleh Pemerintah Desa Cimanggu Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran, secara umum sudah dilaksanakan dan diterapkan namun belum sepenuhnya optimal. Hal ini dibuktikan bahwa optimalisasi penggunaan sistem informasi desa yang dilakukan oleh pemerintah desa pada umumnya belum sepenuhnya optimal sebagai mana pendapat Hotniar Siringoringo (2005:5) yaitu tujuan, alternatif keputusan, sumber daya yang dibatasi, misalnya masih banyak masyarakat yang belum paham tentang

sistem informasi desa, masyarakat tidak semuanya memiliki *smart phone*, edukasi yang diberikan masih kurang, kurangnya anggaran dan sarana dan prasarana masih belum begitu kumplit.

Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti ditemukan Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Optimalisasi Penggunaan Sistem Informasi Desa Dalam Pelayanan Kepada Masyarakat Oleh Pemerintah Desa Cimanggu Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran, sebagaimana hasil wawancara diketahui masih kurangnya wawasan masyarakat tentang sistem informasi desa dan masih sedikit masyarakat yang memiliki *handphone* yang menunjang, itu sangat menonjol dalam pelaksanaannya tentu menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M.A. (2014). *Analisis Optimalisasi Pelayanan Konsumen Berdasarkan Teori Antrian pada Kaltimgps.Com di Samarinda*. Ejournal Ilmu Administrasi Bisnis.
- Djahir, Yulia dan Dewi Pratita. (2015). *Bahan Ajar Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta : Deepublish.
- Kuswara, H., & Kusmana, D. (2017). *Sistem Informasi Absensi Siswa Berbasis Web Dengan SMS Gateway Pada Sekolah Menengah Kejuruan Al – Munir Bekasi*.

- Indonesian Journal on Networking and Security, 6(2), 17–22. Retrieved from <http://ijns.org/journal/index.php/ijns/article/view/22>
- Poerwadarminta W.J.S. (1976). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta.
- Siringoringo, Hotniar. (2015). *Pemrograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Solekhan, (2014). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Malang: Setara Pers.
- Sutabri, Tata. (2012). *Analisis Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi
- Peraturan Bupati Ciamis Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa
- Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.